



Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru

Eko Handrian^{a1}, Siti Hawa^{b2}

^aAdministrasi Publik Universitas Islam Riau Jl Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru

^bAdministrasi Publik Universitas Islam Riau Jl Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru

¹ekohandrian@soc.uir.ac.id ²sitihawa@student.uir.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 02-03-2022

Disetujui: 07-03-2022

Dipublikasikan: 21-03-2022

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. Program
3. Pengembangan Perikanan Tangkap

Keyword:

1. Implementation
2. Program
3. Capture Fisheries Development

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui dan Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Pekanbaru, indikator penilaian yang digunakan meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi sosial, Politik dan Ekonomi. Tipe penelitian ini menggunakan Deskriptif dengan metode penelitian Kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan teknik daftar kuesioner dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu Terimplementasi. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik. Namun kegiatan dan program yang dilaksanakan belum sesuai dengan filosofi program pengembangan perikanan tangkap di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Abstract: This study aims to determine and implement the Capture Fisheries Development Program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service, the assessment indicators used include Policy Standards and Targets, Resources, Inter-Organizational Relations, Characteristics of Implementing Agencies, Social, Political and Economic Conditions. This type of research uses descriptive quantitative research methods with data collection techniques used consisting of primary data collected by questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation and documentation. Based on the results of the research, it is known that in this study from the side of the official apparatus that the implementation of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service is implemented. This is because it is seen from an internal point of view, namely the official apparatus that the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service as the executor of the Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service has been carried out properly and seen from the community's point of view as an external party that, to realize the Development program Capture Fisheries at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service, it is very important to carry out outreach to the community, this is also to help the community become more aware that the government has provided a Capture Fisheries Development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Service and the public is also not lacking in public information. . However, the activities and programs carried out are not in accordance with the philosophy of the capture fisheries development program at the Pekanbaru City Agriculture and Fisheries Office

PENDAHULUAN

Perikanan tangkap memiliki peran penting dan strategis di Indonesia, sedikitnya dapat dilihat dari tiga peran, yaitu sumber pertumbuhan ekonomi, sumber pangan khususnya protein hewani, dan penyediaan lapangan kerja. Perikanan menciptakan lapangan kerja ketika sumber penghasilan lainnya gagal. Pentingnya perikanan tangkap tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa Negara di Asia, Eropa dan Amerika. Fakta ini diungkapkan Fauzi (2010) bahwa sector perikanan di beberapa Negara di Eropa dan Amerika telah menjadi sumber “energi” dan mesin pertumbuhan ekonomi regional.

Peran sektor perikanan di beberapa Negara diketahui dengan tajamnya peningkatan produksi perikanan dunia. Fauzi & Anna (2002) menyebutkan bahwa sumber daya perikanan sebagai salah satu aset penting Negara apabila dikelola secara baik, dan memberikan manfaat maksimum bagi masyarakat. Sementara itu kontribusi produksi perikanan tangkap laut di dunia terus menurun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/ MEN/ 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ PERMEN-KEP/ 2014 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Perikanan tangkap berbeda dengan perikanan budidaya, dimana Perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan hewan yang hidup di air laut atau perairan umum secara bebas. Sedangkan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Secara umum ada beberapa hal yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan, diantaranya di pengaruhi oleh musim, daerah penangkapan, alat tangkap dan armada tangkap yang digunakan.

Berdasarkan data Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, kegiatan perikanan tangkap adalah kegiatan dominan yang dilakukan oleh masyarakat/ nelayan di Kota Pekanbaru sehingga produksi perikanan di Kota Pekanbaru hampir 98% berasal dari usaha penangkapan ikan. Pendapatan nelayan tidak terlepas dari investasi usaha, modal usaha, dan penerimaan setelah proses penangkapan. Adanya modal usaha dalam proses penangkapan dapat memberikan kemudahan dalam usaha penangkapan ikan, serta sebagai sarana nelayan untuk mencari ikan di laut. Kegiatan proses penangkapan ikan dapat menentukan keberhasilan hasil tangkapan nelayan.

Pembangunan sektor perikanan di Kota Pekanbaru diarahkan pada pembangunan yang ramah lingkungan, produktif dan efisien, secara khusus pembangunan perikanan tangkap dilakukan dalam koridor kelstarian agar fungsi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat serta sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, diantaranya melalui rasionalisasi alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan melalui optimalisasi sarana/armada penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan. Berdasarkan pengembangan kawasan, maka pengembangan

perikanan tangkap di Kota Pekanbaru terdapat pada kawasan Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 Potensi perikanan tangkap di Kota Pekanbaru harus dijaga kelestariannya melalui substitusi dan atau rasionalisasi alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan optimalisasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan yang digunakan oleh para nelayan sehingga tercipta penangkapan ikan secara lestari. Salah satu faktor rendahnya produksi hasil perikanan disebabkan oleh sebagian besar nelayan belum mempunyai perahu dan mesin yang layak sebagai armadapenangkapan ikan serta alat penangkapan ikan yang tidak memadai sehingga penangkapan belum terlaksana dengan optimal. Berdasarkan Laporan Akhir Penyusunan Data Base (Peta) Potensi petanian Kota Pekanbaru Tahun 2007, maka total luas perairan umum di Kota Pekanbaru (eksisting) adalah 7.954,58 Ha.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan tangkap di Kota Pekanbaru harus didukung oleh beberapa aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sarana dan prasarana serta permodalan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan usaha nelayan melalui peningkatan skala ekonomi usaha dalam wadah kelompok Usaha Bersama (KUB).Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota dan disahkan oleh Instansi yang berwenang (Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Nomor 6 Tahun 2019).

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Seksi perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kerjasama, evaluasi program, penyediaan data dan informasi serta penyusunan laporan di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, analisis dan evaluasi serta penyiapan penataan organisasi dan ketataleaksanaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dokumentasi.Pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan penyuluhan. Adapun terdapat program perikanan tangkap dimana dalam program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

1. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan

Program pengembangan perikanan tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan nelayan dengan diberikannya Sarana dan prasarana perikanan tangkap.maka pentingnya

mengetahui seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan keberhasilan program.

Pada kegiatan pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dimana diikuti terdiri dari 23 kelompok dimana berdasarkan standar dan sasaran kegiatan tersebut semestinya setiap kelompok diutus 2 orang dari setiap kelompok tapi pada pelaksanaannya satu orang satu kelompok. Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang perikanan tangkap. Yang mana bidang perikanan tangkap mempunyai tiga seksi namun dari penulis lihat dilapangan ada satu seksi bidang perikanan tangkap yang kosong.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dengan metode kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Kepala Bidang Perikanan (2) Seksi Bidang Perikanan Tangkap (3) Pegawai Bidang Perikanan Tangkap (4) Nelayan. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *Purposive Sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kuesioner (2) Wawancara (3) Observasi dan (4) Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan menggunakan statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, dan dianalisis menggunakan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dalam penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari lima indikator yang meliputi Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agran Pelaksana dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Aparatur Dinas program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Item Yang Dinilai	Skor Penilaian		
	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana
Standar dan Sasaran Kebijakan	15 (50%)	15 (50%)	0 (0%)
Sumber Daya	30 (67%)	15 (33%)	0 (0%)
Hubungan Antar Organisasi	24 (80%)	4 (50%)	0 (0%)
Karakteristik agen pelaksana	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Kondisi Sosial ekonomi dan Politik	8 (54%)	6 (40%)	1 (6%)

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas rekapitulasi diketahui dari hasil penyebaran kuesioner pada aparaturn dinas diperoleh hasil bahwa implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru rata-rata berada pada kategori “Terimplementasi dan Cukup terimplementasi. Indikator Standar dan Sasaran kebijakan diketahui Cukup Terimplementasi Hal ini dikarenakan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, masih adanya ketidaksesuaian dengan tujuan dari dilaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Indikator Sumber Daya diketahui Terimplementasi hal ini dikarenakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah menjalankan program Pengembangan Perikanan Tangkap sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP sehingga sudah tepat sasaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi diketahui Terimplementasi dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat nelayan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana diketahui Terimplementasi dikarenakan aparaturn dinas menilai sudah melakukan tanggung jawab dengan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, berpartisipasi dan responsivitas. Maka mereka menilai karakteristik agen pelaksana sudah memenuhi syarat atau sudah terlaksana. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, diketahui Terimplementasi. Hal ini dikarenakan aparaturn menilai hasil yang maksimal dalam program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yang membantu kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi lebih baik lagi.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah mengadakan pelatihan kepada nelayan, Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Permodalan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, Kegiatan pelatihan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Peserta pelatihan penguatan kelembagaan dan permodalan bersal dari perwakilan setiap KUB yang ada di Kota Pekanbaru. Pelatihan Penguatan kelembagaan dan permodalan pada kegiatan pendamping pada kelompok nelayan perikanan tangkap diikuti oleh pelaku usaha perikanan tangkap se-kota Pekanbaru sebanyak 25 orang. Nama-nama tersebut diusulkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dengan suatu surat keputusan sebagai peserta pelatihan.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) merupakan kegiatan pada Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang Perikanan Tahun 2019. DAK Fisik Bidang Perikanan tersebut masuk kedalam APBD Kota Pekanbaru Tahun 2019 dengan nomenklatur Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat. Rinciannya kegiatannya merupakan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Sebanyak 15 Paket.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Nomor: 523/PA-PPK/PPKNPT/94/III/2019 maka dibentuk Tim Perencanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan (DAK) untuk menentukan calon penerima Paket Bantuan tersebut. Setelah Tim melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi dokumen/ data serta kelayakan kegiatan usaha penangkapan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon penerima paket bantuan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan dari sisi aparaturnya bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu Terimplementasi. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparaturnya bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya.

Tabel 2

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru

Item Yang Dinilai	Skor Penilaian		
	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana
Standar dan Sasaran Kebijakan	36 (60%)	16 (40%)	0 (0%)
Sumber Daya	54 (60%)	18 (30%)	3 (10%)
Hubungan Antar Organisasi	54 (90%)	4 (10%)	0 (0%)
Karakteristik agen pelaksana	42 (47%)	24 (40%)	4 (13%)
Kondisi Sosial ekonomi dan Politik	27 (30%)	30 (63,3%)	6 (6,7%)

Sumber: Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari hasil tabel rekapitulasi diatas diketahui rata-rata jawaban responden masyarakat nelayan berada pada kategori Terimplementasi. Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan diketahui dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat, menjawab Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan masyarakat merasakan dampak yang nyata setelah mengikuti program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Indikator Sumber Daya diketahui Cukup Terimplementasi dikarenakan masyarakat merasa bahwa aparaturnya dalam menjalankan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru belum memproses aspirasi secara maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya memberikan kemudahan dari segi waktu, efisiensi anggaran.

Indikator Hubungan Antar Organisasi diketahui bahwa Terimplementasi dikarenakan hubungan antar organisasi dalam memproses aspirasi dan pengaduan masyarakat nelayan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah berjalan dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat diketahui Cukup Terimplemmtasi, Hal ini dikarenakan aparaturnya

yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi dari hasil penyebaran kuesioner masyarakat diketahui Cukup Terimplementasi, Hal ini dikarenakan masyarakat melihat kurang maksimalnya perubahan pada kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Nelayan sebagai salah satu komponen dalam pengembangan perikanan tangkap di Kota Pekanbaru perlu dibina secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada, maka upaya strategis yang harus ditempuh yaitu mengubah pola pikir para nelayan dari penangkapan di perairan umum daratan (PUD) ke arah budidaya ikan, baik di kolam atau bak terpal maupun di keramba/jaringan apung di perairan umum daratan (PUD).

Salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya nelayan adalah Rumbai pesisir. Rumbai pesisir memiliki jumlah nelayan terbanyak. Mata pencaharian penduduk disini cukup beraneka ragam. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dengan sungai atau perairan misalnya menjadi nelayan.

Keberadaan nelayan merupakan potensi strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun peran nelayan pada saat ini masih belum optimal karena keterbatasan yang dimiliki nelayan, seperti akses teknologi karena keterbatasan penguasaan teknologi dan sarana penangkapan ikan, akses pasar karena panjangnya rantai pasar produsen ke konsumen, akses permodalan. Keterbatasan tersebut berdampak langsung terhadap minimnya pendapatan nelayan yang bermuara pada masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan tidak dapat dilakukan orang per orang. Pembinaan untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) nelayan dilakukan secara komunal melalui kelompok-kelompok nelayan. Membangun wawasan untuk maju bersama melalui kelompok, dapat mendorong partisipasi masyarakat nelayan menumbuhkan kelompok baru dan mengembangkan serta memperkuat kelompok yang sudah ada.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan tangkap di Kota Pekanbaru harus didukung oleh beberapa aspek, mulai dari sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, sarana dan prasarana serta permodalan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan usaha nelayan melalui peningkatan skala ekonomi usaha dalam wadah kelompok Usaha Bersama (KUB). Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota dan disahkan oleh Instansi yang berwenang (Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI Nomor 6 Tahun 2019).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari sisi masyarakat bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru Cukup Terimplementasi. Karena dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, sesuai dengan tujuan program pengembangan perikanan tangkap yang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada, dengan melaksanakan berbagai upaya strategis yang ditempuh yaitu mengubah pola pikir para nelayan dari penangkapan di perairan umum daratan (PUD) ke arah budidaya ikan, baik di kolam atau bak terpal maupun di keramba/jaringan apung di perairan umum daratan (PUD), dengan berdasarkan lima indikator yang menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian yaitu, Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Hubungan Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. penulis dapat mengambil jawaban pada penelitian ini dari sisi aparatur dinas bahwa Implementasi program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru yaitu Terimplementasi. Hal ini dikarenakan dilihat sudut pandang internal yaitu aparatur dinas bahwa, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan semestinya dan dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak eksternal bahwa, untuk mewujudkan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru memang sangat penting dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini juga agar dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dan masyarakat juga tidak minim akan informasi publik. Namun kegiatan dan program yang dilaksanakan belum sesuai dengan filosofi program pengembangan perikanan tangkap di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Saran

Adapun saran Kepada Dinas pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru meskipun kegiatan dalam program perikanan tangkap terimplementasi dengan baik namun masih belum sesuai dengan tujuan awal program tersebut yaitu mengubah pola pikir nelayan kearah budidaya ikan, sebaiknya kegiatan program yang dilaksanakan kedepannya sejalan dengan tujuannya seperti bantuan modal untuk pengembangan budidaya, atau penyediaan lahan bagi masyarakat untuk melakukan budidaya ikan. Kepada KUB agar kinerja menjadi optimal untuk bersama sama dapat mendirikan koperasi perikanan yang mandiri selain itu Sebaiknya dalam melaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan

Perikanan Kota Pekanbaru agar ada layanan aspirasi secara online sehingga pihak Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru dapat melaksanakan koordinasi dan sosialisasi secara teratur atau pun terjadwal yang bisa dilakukan setiap bulan tanpa harus bertemu secara langsung, agar masyarakat dapat merasa puas sudah mengikuti program Pengembangan Perikanan Tangkap Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru seperti peng gagasan Onedata KKP sehingga terjadi unifikasi data di dinas. Pelaksanaan pendataan rumah tangga perikanan (RTP) kedepannya dapat dibuatkan sebuah aplikasi mobile sehingga para nelayan tidak perlu lagi ke kantor dinas untuk mendaftar hanya tinggal melalui sebuah aplikasi didalam Handpone.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi A. (2010). Ekonomi Perikanan "Teori Kebijakan dan Pengelolaan. Jakarta (ID) : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Abidin, Said Zainal. (2011). Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alim, Sumarno. (2012). Penelitian Kausalitas Kompratif. Surabaya: Elearningunesa.
- Arifin, Zaibal. (2012). Penelitian Pendidikan. Metode dan Paradigma Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Badrudin. (2013). Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W William. (2003). Analisa Kebijakan. Jakarta: PT. Buni Aksara.
- Fathoni, Aburrahmat. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, T Hani. (2009). Manajemen. Jakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P (2001). Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusnadi. (2002). Konflik Sosial Nelayan : Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKis.
- Nugroho, Riant D. (2012). Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Zulkifli, dan Nurmasari. (2015). Pengantar Manajemen. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Santosa, Pandji. (2009). Administrasi Publik Teori Aplikasi Good. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2003). Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, Inu Kencana. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, Krintian Widya. (2006). Administrasi dan Birokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita .
- Zulkifli, Moris Adidi Yogia. (2014). Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Fauzi A & Anna Z. (2002). Penilaian Despresiasi Sumber daya Perikanan Sebagai Bahan Pertimbangan Penentuan Kebijakan Pembangunan Perikanan.
- Zulkifli. (2005). Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen. pekanbaru: UIR.